KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sudah Dijadwalkan Di Rapat Bamus: Pembentukan Pansus "Ahok Gate" Bakal Dibahas Di Sidang Paripurna
Tanggal : Sabtu, 18 Februari 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sudah Dijadwalkan Di Rapat Bamus

Pembentukan Pansus "Ahok Gate" Bakal Dibahas Di Sidang Paripurna

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pede usulan pembentukan Pansus Hak Angket atas keputusan Mendagri yang tak menonaktifkan Ahok dari posisi Gubernur DKI alias Pansus "Ahok Gate" bisa dibawa ke rapat paripurna, pekan depan. Soalnya, usulan pembentukan Pansus sudah disetujui dalam rapat pimpinan (rapim) DPR, Selasa lalu.

"SUDAH sampai rapim. Bahkan sudah sampai penjadwalan (dalam rapat) Bamus (Badan Musyawarah)," ucap Fahri di Gedung DPR, kemarin.

Kata politisi PKS yang sempat berseteru dengan partainya ini, rapat Bamus akan digelar pada awal pekan depan. Peserta rapat terdiri atas pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi. Di dalamnya akan dibahas agenda yang masuk dalam rapat paripurna pada 23 dan 24 Februari nanti.

Fahri yakin, pembahasan di Bamus akan berjalan mulus. Sebab, tugas Bamus hanya menjadwalkan sebuah usulan untuk dimasukkan di dalam rapat paripurna.

"Kemungkinan, rapat Bamus itu digelar Senin atau Selasa. (Agendanya) untuk membahas lanjutan dari usulan, yaitu penjadwalan untuk dibaca di paripurna," tuturnya.

Namun, soal tembus atau tidaknya hak angket itu, Fahri belum bisa mengira-ngira. Sebab, di paripurna nanti, keputusan itu akan dilempar kepada semua anggota Dewan yang hadir. Dia memprediksi, pengambilan keputusan bakal alot. Sebab, partai pendukung pemerintah bakal berusaha menggagalkan pembentukan Pansus itu.

"Jadi, bisa panjang waktu untuk pengambilan keputusannya. Kalau paripurnanya baru hanya pembacaan, lalu ada jeda untuk persetujuan hingga lobi untuk siapa yang setujui dan yang nggak," ucapnya.

Sebelumnya, sudah ada 93 anggota DPR yang tanda tangan yang mengusulkan Pansus itu. Para pengusul ini berasal dari Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Dari segi syarat usulan, memang sudah mencukupi. Tapi, untuk mendapat pengesahan, masih jauh. Sebab, jika divoting, usulan itu baru sah jika disetujui 50 persen plus 1 dari 560 anggota Dewan. Kondisi ini sepetinya agak berat. Sebab, fraksi-fraksi pendukung pemerintah yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PPP tidak akan diam melihat keinginan para pengusul itu.

Meski kondisinya begitu, Fahri tetap berusaha optimis. Kata dia, dalam paripurna, yang punya suara adalah anggota, bukan fraksi. "Itu kan hak anggota, bukan hak fraksi. Keputusan dan kesepakatan itu adalah hak anggota. Meskipun anggota itu berada di fraksi, tapi votingnya itu harus tetap orang per orang,"

cetusnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa dan anggota Fraksi PKS Nasir Djamil mengaku agak ragu pembentukan Pansus itu bakal mulus. Dengan gemuknya koalisi pendukung pemerintah di parlemen, pembentukan Pansus tersebut menjadi sangat berat.

"Memang hal ini sudah kami duga. Sejak awal sudah kami duga, kalau upaya hak angket ini takkan mungkin terlaksana," kata Desmond.

Meski begitu, anggota Komisi III tetap berusaha menghibur diri. Kata dia, kalaupun hak angket tidak terlaksana, masyarakat sudah mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Selain itu, juga akan tercatat di masyarakat fraksi-fraksi yang justru membiarkan pemerintah melanggar peraturan perundang-undangan.

"Ini kan nanti dicatat dalam risalah persidangan. Dengan begitu, tercatat bahwa saat ini parlemen sudah mandul," cetusnya.

Nasir Djamil mengistilahkan ada tembok tinggi dan besar yang menghalangi bergulirnya Pansus tersebut. Namun begitu, anggota Komisi III ini juga tetap berusaha menjaga asa. "Kami harus tetap optimis, walaupun ada tembok yang tinggi. Jadi, harus manjat-manjat dikit lah. Kalau perlu, pakai tali manjatnya," katanya.

Nasir menjelaskan, sistem mengambil keputusan di DPR ada dua cara, musyawarah mufakat dan voting. Nah, kalau musyawarah tidak bisa dilakukan, otomatis pengambilan keputusan Hak Angket "Ahok Gate" dalam paripurna nanti dilakukan melalui voting. "Otomatis juga suara yang paling banyak akan menang," cetusnya.

Tapi, kata Nasir, hak angket ini bukan soal jadi atau tidak. Setidaknya, Fraksi PKS ingin memberitahukan kepada masyarakat Indonesia bahwa ada perlakuan tidak adil dan ada potensi melanggar undang-undang yang dilakukan pemerintah. ■ ONI